

90/00761

PROSES SEKULARISME DI NEGARA BERKEMBANG

OLEH :

Dra. SUSANTI

Nip. 192 052 021

UNIVERSITAS TERBUKA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

1995

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan anugerah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan makalah dengan judul : "Proses Sekularisme di Negara Berkembang".

Makalah ini disusun untuk memenuhi pengembangan disiplin ilmu pemerintahan yang telah berkembang pesat sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Penyusunan makalah ini tidak lepas dari pengarahan serta bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan FISIP Universitas Terbuka.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka makalah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak. Akhir kata semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu pemerintahan serta bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Jakarta 1995

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	2
BAB II PEMBAHASAN MASALAH	3
A. Sekularisme dan Negara Sekuler	3
B. Sekularisme di Negara Berkembang	
B.1. Sekularisme Pada Umumnya	4
B.2. Pola Sekularisasi Pemerintahan	12
B.3. Bidang-bidang Utama yang menjadi Sekular	13
C. Sekularisme di Indonesia	17
BAB III KESIMPULAN	20
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah perkembangan negara-negara Eropa berbeda dengan sejarah perkembangan negara Indonesia. Pada abad pertengahan di Eropa ditandai dengan dominannya kekuasaan gereja, dan agama Nasrani menjadi sumber kepercayaan mutlak. Filsafat agama merupakan pegangan utama, sehingga pemerintahan waktu itu dikenal dengan pemerintahan theokrasi.

Masyarakat abad pertengahan didirikan oleh struktur sosial yang feodal, yang kehidupan sosial serta spriritualnya dikuasai oleh pimpinan agama. Sedangkan dalam kehidupan politik ditandai dengan adanya perebutan kekuasaan di antara para bangsawan keturunan raja. Pada permulaan abad ke-16 di Eropa Barat muncul negara-negara nasional (national state) dalam bentuk yang modern, maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kulturil yang mempersiapkan jalan untuk memasuki jaman yang lebih modern dimana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Kejadian ini ialah Renaissance (1350-1600) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Itali dan Reformasi (1500-1650) mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara seperti Jerman dan Swiss.¹⁾

Renaissance bertentangan dengan pandangan gereja atau agama, sebab menempatkan manusia sebagai pusat segalanya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, renaissance dan humanisme menimbulkan

1). Budiardjo, Miriam; Dasar-dasar Ilmu Politik; Gramedia; Jakarta; 1986; hal. 54-55.

pemikiran baru tentang gereja atau gerakan reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther tahun 1517 yang melahirkan aliran baru dalam gereja, yaitu Kristen Protestan. Demikian pula dalam bidang astronomi timbul pendapat baru yang dipelopori oleh Copernicus. Dan pada abad ke-18 renaissance dan humanisme mencapai puncaknya dengan gerakan nasionalisme yang mengagungkan rasio manusia. Segala persoalan dapat dipecahkan berdasarkan ketajaman rasio manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka timbullah aliran sekular (sekularisme) dan negara sekular.

Agama yang selama ini dirasakan menghambat perkembangan rasio manusia, sudah waktunya dihilangkan pengaruhnya dan dipisahkan secara mutlak dari pemerintahan. Agama dianggap sebagai rintangan kemajuan, dan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan rasio manusia. Pemikiran ini menimbulkan paham sekularisme maju pesat di benua Eropa.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang ada berkaitan dengan sekularisme di negara berkembang adalah :

1. Bagaimana proses sekularisme mempengaruhi kehidupan negara berkembang ?
2. Apakah Indonesia menerapkan praktek sekularisme ?

BAB II PEMBAHASAN MASALAH

A. SEKULARISME DAN NEGARA SEKULAR

Di negara sedang berkembang, sekularisme dan negara sekular menjadi masalah yang sangat penting. Menurut Basman, MA, sekularisme adalah gerakan materialistis dan rasional yang dimulai di Inggris oleh George Holyke, seorang agitator buruh tahun 1864. Sedangkan The Encyclopedia Americana menyatakan bahwa sekularisme adalah suatu sistem tata susila yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral alamiah dan terlepas dari ajaran agama. Menurut The Advanced Learner s Dictionary of Current English, sekularisme adalah suatu pandangan bahwa pengaruh organisasi agama harus dikurangi sejauh mungkin dan moral serta pendidikan harus dipisahkan dari agama. Sedangkan sekular diartikan duniawi, tidak berhubungan dengan agama atau rohani.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sekularisme adalah pemisahan antara urusan negara dan urusan agama. Sedangkan negara sekular adalah negara yang menganut paham sekularisme. Artinya negara menjalankan tugas terlepas dari masalah atau aturan aturan agama, sehingga masalah agama dan pengembangannya hanya diurus oleh para pemeluknya. Dengan demikian peraturan hukum dan pelaksanaannya tidak pernah dilaksanakan dengan pertimbangan agama. Jadi negara sekular hanya mengurus masalah material saja, sedangkan masalah spiritual tidak diperhatikan sama sekali. Contoh : Amerika Serikat, yang mengadakan pemisahan antara agama dan negara, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 dari sepuluh amandemen pertama

terdapat ketentuan sebagai berikut :

"Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof"
 (Kongres tidak akan membuat undang-undang yang memperhatikan ketentuan agama atau melarang kebebasan pelaksanaannya).

Negara sekular yang lebih keras terhadap agama adalah eks negara Uni Soviet, dimana negara tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, bahkan masyarakat diperbolehkan propaganda anti agama serta negara tidak menghendaki adanya sikap netral terhadap agama. Dengan demikian negara sekular hanya mengurus masalah material saja, sedangkan yang non material atau spiritual tidak diperhatikan sama sekali.

B. SEKULARISME DI NEGARA BERKEMBANG

B.1. SEKULARISME PADA UMUMNYA

Di negara-negara berkembang biasanya melakukan pembangunan untuk mengejar ketinggalan dari negara maju dengan cara modernisasi. Modernisasi ini seringkali lebih menekankan pada aspek pembaharuan di bidang teknologi dan ekonomi. Menurut Manped Halpern, revolusi modernisasi ini melibatkan transformasi semua sistem yang dipakai individu untuk mengatur masyarakatnya baik sistem politik, sosial, ekonomi, intelektual, keagamaan maupun psikologi. Proses-proses rumit ini secara radikal mengubah hubungan-hubungan tradisional antara masyarakat, pemerintah dan agama secara mendasar merupakan suatu diferensiasi dimana

 2). Donald E, Smith; Religion and Political Development, an Analytic Study; Little Brown; Boston; 1985; hal. 5.

masyarakat-masyarakat sakral terintegrasi oleh sistem religio politik, sedang bergerak menuju transformasi baru sebagai masyarakat non sakral yang dibimbing oleh pemerintah yang semakin maju.

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua peradaban besar yang masih berlaku, secara mendasar berorientasi keagamaan, oleh karena itu menyajikan pemecahan-pemecahan keagamaan terhadap masalah organisasi sosial dan politik. Yang paling pokok adalah adanya keyakinan kuat dari para penganut agama bahwa hakiki pemerintahan secara esensial bersifat sakral. Pada waktu itu semua pemerintah negara berkembang merupakan sistem religio politik, sehingga banyak di antara pola-pola dasar kemasyarakatan mempunyai bentuk yang sama. Dalam masyarakat yang menganut sistem religio politik juga berusaha untuk melakukan pembangunan.

Di negara sedang berkembang pengertian pembangunan tidak terbatas pada bidang ekonomi saja, tetapi juga bidang sosial dan politik. Bahkan kondisi sosial dan politik dapat memegang peranan penting dalam mengendalikan jalannya pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya kegiatan pembangunan biasanya ditandai dengan adanya suatu usaha konsolidasi kekuatan nasional dan mempersatukan sub-sub budaya politik yang terkotak-kotak ke dalam satu ikatan yang utuh. Hal ini bertujuan agar semua sumber daya yang dimiliki dapat dipadukan ke satu tujuan nasional lewat kerjasama yang terorganisir. Cara dan teknik yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut bervariasi antara satu negara dengan negara lain, tetapi pada dasarnya sistem yang dipakai

dapat diperinci dalam tiga bagian yaitu sistem liberalisme yang dianut di Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia dan Jepang; sistem komunisme yang dianut di negara-negara Eropa Timur, RRC, dan Korea Utara; serta sinkrasi yang merupakan kombinasi antara sistem liberalisme dan komunisme sebagai sandaran berpijak dalam melakukan pembangunan, biasanya dianut oleh negara-negara berkembang. Sistem mana yang lebih efektif dalam menghantarkan masyarakat suatu negara ke tingkat yang lebih modern, tergantung pada beberapa aspek. Menurut Wilfred Malenbaum dan Wolfgang Stolper menyatakan bahwa negara-negara yang menganut sistem liberal ternyata memiliki tingkat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa secara otomatis konsep liberalisme akan dapat berfungsi efektif jika diterapkan di negara berkembang. Bahkan pembangunan ekonomi dan politik di negara-negara berkembang ternyata juga berbeda-beda.³⁾ Sedangkan Ibrahim Abu Lughod mengemukakan bahwa perbedaan pembangunan ekonomi dan politik di negara-negara berkembang tersebut disebabkan karena agama (artinya ada negara yang disatukan oleh tradisi agama besar), tetapi ada pula negara yang tidak disatukan oleh tradisi agama besar.⁴⁾

Agama mempersatukan masyarakat tradisional dengan memberikan kerangka pikir dan pengalaman dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui proses sosialisasi, para penganut agama

3). Gaffar, Afan; Beberapa Aspek Pembangunan Politik; Rajawali; Jakarta; 1983; hal. XVIII-XIX.

4). Donald E, Smith; op.cit.; hal. 9.

memperoleh seperangkat kepercayaan dan nilai yang berkaitan dengan lambang-lambang yang sakral/suci. Dengan bersama-sama mengikuti upacara-upacara peribadatan, merayakan hari besar keagamaan serta menjalankan semua perintah agama, para anggota masyarakat dapat dipersatukan. Bahkan peninggalan budaya masyarakat tradisional baik bersifat material, kesenian tari, musik, arsitektur menampilkan ide-ide dan nilai-nilai keagamaan; sehingga dalam kenyataan hidup masyarakat sehari-hari agama sering bersumber pada budaya masyarakat.

Agama masuk secara perlahan dan merata ke dalam lembaga-lembaga sosial yang penting. Agama berfungsi mengatur kelas-kelas dan tatanan sosial secara hirarkis dalam bentuk sistem sosial yang piramida, serta menyelenggarakan pendidikan yang bersifat umum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agama mengatur tingkah laku sosial, ekonomi, budaya dan pemerintah. Agama dan pemerintah berfungsi melakukan pengendalian sosial terhadap masyarakat luas dan membentuk sistem religio politik yang terpadu. Dalam negara dengan sistem religio politik, komponen ideologi sepenuhnya diberikan oleh agama, sehingga didalamnya tidak ada ideologi sekular. Ide-ide keagamaan menjamin keabsahan sistem religio politik dan terutama menjamin penguasa yang memerintah.

Pada tahap selanjutnya peranan penguasa luas sekali, selain sebagai pemimpin pemerintahan juga sebagai pemimpin tertinggi kelompok agama. Dengan demikian terdapat konsepsi tentang penggabungan fungsi-fungsi keagamaan dan politik yang dimainkan oleh suatu struktur yang tunggal. Penguasa menjalankan kekuasaan duniawi dan sekaligus kekuasaan spiritual. Fungsi utama

penguasa adalah menegakkan tata sosial yang bersifat Ketuhanan sesuai dengan hukum dan tradisi yang sakral. Tingkatan hirarki keagamaan yang ada dapat dimanfaatkan oleh penguasa untuk memberlakukan hukum dan politik sesuai yang dikehendaki.

Dalam hal ini, penguasa politik mempunyai kedudukan yang dominan dalam penggabungan antara fungsi keagamaan dan politik. Sistem religio politik tersebut mampu mengendalikan masyarakat secara luas dan otoritas politik yang cukup mantap di berbagai negara berkembang. Sistem religio politik di negara-negara sedang berkembang mempunyai arti yang sangat penting, karena berhubungan dengan ideologi keagamaan dan kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat. Namun demikian, ideologi keagamaan di negara berkembang bisa juga menghadapi masalah dari dalam maupun luar negeri. Masalah tersebut terjadi di negara-negara yang dikuasai oleh imperialisme Barat, terutama masalah militer dan politik. Bahkan masalah tersebut akan merambat di bidang sosial, ekonomi, intelektual, teknologi dan keagamaan terhadap tradisi.

Masalah yang timbul di negara-negara yang menerapkan sistem religio politik ini bentuknya bermacam-macam, dan berjalan dengan kecepatan yang berbeda-beda pula. Masalah tersebut timbul dengan tujuan untuk memecah belah sifat persatuan masyarakat yang telah diikat oleh paham keagamaan. Dalam negara dengan sistem religio politik tersebut agama tidak dapat mengakui lagi kekuasaan politik dengan cara yang meyakinkan sebagaimana terjadi sebelumnya. Demikian pula pemerintah tidak dapat lagi mengatur urusan-urusan keagamaan dengan cara tertentu. Kemunduran sistem religio politik mengakibatkan pemerintah berdiri tanpa dukungan

dari para ulama atau pimpinan agama, bahkan agama yang berhak mempunyai otonomi tidak dapat lagi menikmati otonominya.

Kemunduran sistem religio politik merupakan awal dari sekularisasi pemerintahan. Hal tersebut merupakan salah satu pokok dalam pembangunan politik. Bagi bangsa-bangsa yang berada dalam kekuasaan paham imperialis masalah agama dan pemerintahan tidak pernah dapat dipecahkan dengan tuntas. Di negara-negara berkembang, arus pemikiran bercorak liberal, demokratik dan sosialis terpadu bersama-sama dengan nasionalisme, menghasilkan formulasi-formulasi ideologis yang sah, yang secara memuaskan diyakini oleh kalangan elite.

Dengan mundurnya sistem tradisional keagamaan berarti kekuasaan politik sekular makin dominan dalam pemerintahan, dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan politik negara maju. Sekularisme merupakan langkah utama untuk memajukan masyarakat dari masyarakat integralisme menuju pluralisme. Pluralisme fungsional menganggap semua agama hanya sebagai salah satu di antara sekian banyak bidang kehidupan yang lainnya, misalnya : pemerintah, perekonomian dan kemasyarakatan secara menyeluruh. Pluralisme yang bertata nilai mencakup pandangan bahwa di samping sistem nilai agama terdapat juga sistem nilai yang lainnya, misalnya : sistem etika, filsafat, berbagai ideologi, serta berbagai gaya hidup yang mendapat tempat sah dalam masyarakat.

Sekularisasi secara garis besar berproses tanpa disadari ke seluruh segi kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan nilai-nilai sekular yang berkaitan dengan pendidikan modern, ilmu, teknologi

dan pembangunan ekonomi tersebar luas dengan perantara media komunikasi massa dan memiliki dampak pada pembangunan politik.⁵⁾

Secara garis besar, sekularisasi ditandai dengan adanya :

1. Pemisahan antara pemerintah, ideologi-ideologi keagamaan dan struktur-struktur kerajaan.
2. Ekspansi pemerintah untuk melaksanakan peran dalam mengatur lapangan sosial ekonomi yang sebelumnya dilakukan oleh struktur-struktur keagamaan.
3. Transformasi budaya politik yang menekankan tujuan duniawi yang nontransenden dengan cara-cara yang rasional dan pragmatis, yaitu berupa nilai politik sekular.

Tiga aspek sekularisasi tersebut berlaku umum dalam pembangunan pemerintahan modern, sehingga ketiga substansi tersebut bersifat universal, walaupun sisa-sisa dari sistem tradisional masih sering terlihat. Contoh : di Inggris, pemerintah telah mengembangkan secara luas peranan pendidikan dan hukum dengan mengorbankan keagamaan tradisional. Sedangkan proses politik secara mendasar merupakan proses yang sangat sekular dan pragmatis. Ikatan secara konstitusional masih ada antara negara dan gereja, meskipun kenyataannya berjalan berlawanan dengan aspek pemisahan dari sekularisasi, dalam arti sekedar sebagai lambang kesinambungan dengan masa lalunya.

Pemerintahan di negara-negara berkembang sangat menaruh perhatian terhadap proses sekularisme yang telah terjadi di seluruh wilayah Dunia Ketiga. Proses sekularisme di tiap-tiap

5). Ibid; hal. 115.

negara tidak sama. Hal ini dapat terjadi karena ikatan tradisi-tradisi agama, artinya makin kuat sistem nilai keagamaan tradisional yang mengikat masyarakat, sekularisasi akan berjalan lambat; tetapi makin lemah tradisi keagamaan, sekularisasi akan berjalan cepat.

Pemerintah-pemerintah revolusioner seperti di Meksiko dan Turki misalnya, berusaha menerapkan bentuk radikal dari sekularisasi dominasi pemerintahan. Dalam kedua kasus tersebut terjadi konflik ideologi antara gerakan politik yang berlandaskan nasionalisme murni dan kelompok agama yang berorientasi universal. Demikian pula di negara-negara lain, konflik-konflik tersebut sering terjadi. Misalnya : di Nigeria hukum pidana Islam digantikan hukum pidana sekular, di India pemerintah menolak untuk memperlakukan warga negara atas dasar tingkat sosial keagamaan, di Srilangka pemerintah menghapus lembaga-lembaga ekonomi suci dari sistem tuan tanah di kalangan para biksu, di Mesir pemerintah lebih memperhatikan sekolah-sekolah pemerintah yang bersifat sekular dibanding sistem pendidikan agama. Demikian pula yang terjadi di negara-negara Amerika Latin, karena pengaruh liberalisme, pemerintah berusaha melakukan sekularisasi yaitu pemisahan antara gereja dengan negara dengan berbagai cara, misalnya :

- a. Mengadakan perkawinan secara perdata.
- b. Masyarakat bebas untuk beragama.

6). Ibid; hal. 121.

- c. Penghapusan hak-hak istimewa di bidang hukum yang diberikan pada para pimpinan agama.
- d. Pencabutan kekuasaan gereja dalam bidang pendidikan.
- e. Pengambilalihan tanah-tanah yang dimiliki gereja.

Dengan demikian pemerintah di negara-negara berkembang berusaha untuk memperkecil arti dan pengaruh nilai agama dalam kehidupan sosial dan politik.

B.2. POLA SEKULARISASI PEMERINTAHAN

Pola sekularisasi pemerintahan di tiap-tiap negara tidak sama kecepatannya. Menurut Smith ada tiga pola, yaitu secara revolusioner, konstitusional dan tanpa status kelembagaan.⁷⁾

Dalam pola sekularisasi pemerintahan revolusioner, semua alat perlengkapan negara yang relatif modern dan sekular digunakan untuk menggantikan semua alat perlengkapan negara pada pemerintah yang didasarkan atas sistem religio politik tradisional. Perubahan secara revolusioner dengan tuntas ini pernah dilakukan oleh penguasaan imperialisme Barat di Asia dan Afrika. Dalam hal ini pemerintahan baru menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing tanpa memperhatikan pemerintah lama yang memperhatikan bidang keagamaan. Negara yang menerapkan pola ini misalnya : Kuba, Turki, Mesir, dan Meksiko.

Pola kedua yaitu pola sekularisasi pemerintahan konstitusional. Perubahan dari pemerintah tradisional secara menyeluruh kepada pemerintahan yang dilandasi sistem sekular,

7). Ibid; hal. 123.

dilakukan melalui proses konstitusional untuk memisahkan agama dan negara. Proses pemisahan tersebut berjalan secara bertahap dan berkesinambungan, sampai pada akhirnya benar-benar terpisah secara damai antara negara dan agama. Contoh : Chili, pada awalnya konstitusi negara Chili memberikan status tertentu kepada agama Katolik, tetapi menjelang pertengahan abad ke-19 sikap-sikap sekular mulai tampak dianut oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada akhirnya pemimpin kelompok liberal dan radikal melakukan sekularisme dengan mencabut status kelembagaan agama yang tertuang dalam konstitusi 1925.

Dalam pola ketiga yaitu pola sekularisasi pemerintahan tanpa status kelembagaan, dapat dilihat bahwa dalam kenyataannya tidak ada satu agama pun yang secara resmi berhubungan dengan pemerintahan. Contoh : Amerika Serikat, dalam konstitusinya pasal 1 dari sepuluh amandemen pertama terdapat ketentuan bahwa kongres tidak akan membuat undang-undang yang memperhatikan ketentuan agama atau melarang kebebasan pelaksanaannya. Negara bagian Amerika Serikat memiliki gereja resmi yang kemudian dicabut status kelembagaannya. Konstitusi negara India dan Srilangka tidak mencantumkan status tertentu bagi agama apapun dan secara tegas menggariskan struktur negara sekular.

B.3. BIDANG-BIDANG UTAMA YANG MENJADI SEKULAR

Dalam masalah sekularisasi ini pemerintah mengembangkan wilayah yurisdiksinya dengan memasuki bidang-bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Artinya pemerintah mengembangkan

peranannya dengan mengurangi peranan agama. Sekularisasi tersebut meliputi : sekularisasi pendidikan, sekularisasi hukum, sekularisasi perekonomian, sekularisasi struktur masyarakat dan sekularisasi budaya politik.⁸⁾

Di negara-negara berkembang, pada awalnya mengembangkan pendidikan keagamaan. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, orientasi dan isi pendidikannya dihapuskan dan diganti dengan kurikulum Barat yang sekular. Contoh : pendidikan di India yang berorientasi pada agama Hindu dan Islam di Kalkuta dihapuskan oleh pemerintah, bahkan pemerintah berusaha keras agar sekolah-sekolah pemerintah tidak melayani kepentingan agama. Demikian pula di Indonesia mulai abad ke-20, sekolah-sekolah agama tradisional mulai berkembang menjadi modern dengan mengajarkan bidang-bidang studi. Menurut Clifford Geertz di negara Islam dan Indonesia, sekolah parokial sangat kuat dan aktif sehingga mempunyai jarak yang dekat dengan kelompok elite modern yang sekular.⁹⁾ Sedangkan di Argentina, dalam statuta 1884 menyatakan bahwa pendidikan umum harus bersifat sekular.

Sekularisasi hukum di negara-negara yang sebagian besar masyarakatnya penganut agama Islam, Katolik atau Hindu, terdapat kesamaan-kesamaan yang mencolok. Selama abad pertengahan ketiga sistem agama ini bersama-sama menerapkan sistem hukum yang berwibawa. Di negara-negara Eropa yang masyarakatnya sebagian besar penganut agama Katolik, sekularisme sudah berjalan sejak

8). Ibid; hal. 130.

9). Geertz, Clifford dalam Robert N. Bellah; Religion and Progress in Modern Asia; Free Press; New York; 1965; hal. 106.

abad ke-15, sedangkan di negara-negara yang menganut paham Hindu dan Islam baru mulai pada abad ke-18 dan ke-19. Dalam ketiga kasus tersebut hukum keluarga yaitu hukum perkawinan, perceraian dan adopsi merupakan bidang terakhir yang terjangkau sekularisasi, dan bahkan di beberapa negara proses sekularisasi tersebut masih jauh dari sempurna.

Pada semua negara berkembang, lembaga-lembaga religio ekonomi merupakan lembaga yang sangat penting. Sistem perwakafan dalam agama Islam dan Hindu menyebabkan terkumpulnya kekayaan dalam bentuk tanah di sekitar masjid dan candi. Di Srilangka misalnya, tradisi pemilikan tanah oleh para biksu Budha tetap merupakan lembaga ekonomi. Pada waktu itu di beberapa negara berkembang pemerintah melakukan program penataan kembali pemilikan tanah, artinya pemerintah mengembangkan wewenang pengaturannya untuk memasuki bidang-bidang ekonomi yang sebelumnya dianggap sakral dan tidak boleh diganggu gugat. Contoh sekularisme perekonomian di Meksiko, dimana pada tahun 1821 separuh dari tanah produktifnya dikuasai oleh gereja. Setiap wilayah keuskupan memiliki lembaga keuangan yang terorganisasi sangat baik yaitu dalam bentuk Juzgado. Juzgado berfungsi sebagai bank penerima sumbangan untuk gereja dan memberikan pinjaman dengan bunga. Perkembangan selanjutnya kelompok liberal berusaha menyingkirkan kekuasaan politik gereja yang didukung oleh kekuatan ekonomi, bahkan menghendaki agar kas negara yang kosong dapat diisi oleh sumber-sumber keuangan gereja.

Dalam sekularisasi struktur masyarakat, pemerintah negara berkembang biasanya menerima dengan baik pendukung tertib sosial

sakral dengan sistem-sistem hirarki sosial. Antara pemerintah dan masyarakat tidak ada pertentangan selama keduanya terikat oleh ideologi keagamaan yang sama. Sekularisasi pemisahan pemerintahan mulai terjadi pada saat beberapa kalangan elite menolak landasan agama sebagai landasan perubahan sosial. Contoh : India menetapkan bahwa negara sebagai pembentuk hukum. Hal ini berlawanan dengan sistem kasta tradisional Hindu. Di beberapa negara Amerika Latin, berhasil mengubah pola hubungan tradisional antara gereja dan negara yang mengakibatkan perubahan struktur sosial dalam masyarakat.

Bidang sekularisasi budaya politik atau disebut juga sekularisasi pengembangan pemerintahan. Sidney Verba mengemukakan bahwa hakekat kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dari sistem kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang ekspresif dan sejumlah nilai yang membatasi tindakan-tindakan politik. Kebudayaan politik selalu menyediakan arah dan orientasi subyektif bagi politik. Sudah tentu kebudayaan politik merupakan salah satu aspek kehidupan politik secara keseluruhan.¹⁰⁾ Dengan demikian garis besar sekularisasi budaya politik mencakup perubahan-perubahan nilai, oleh sebab itu tidak dapat diarahkan secara efektif hanya oleh elite penguasa dalam waktu singkat. Perubahan nilai hanya dapat dilakukan melalui proses sosialisasi yang panjang dan berkesinambungan. Penyebab terjadinya sekularisasi budaya politik ini adalah runtuhnya nilai-nilai agama yang terjadi pada semua lapisan masyarakat. Kesadaran dan

10). Verba, Sidney dalam Afan Gaffar; op.cit.; hal. 75.

ketaatan beragama tidak mendapat perhatian lagi di masyarakat, karena keberadaannya telah digantikan oleh nilai-nilai kebendaan. Contoh : di negara Barat sekularisme nilai-nilai telah menjadi landasan dalam masyarakat, sekularisme budaya secara umum dalam kenyataannya berjalan bersamaan dengan sekularisasi budaya politik.

E. SEKULARISME DI INDONESIA

Istilah sekularisme di Indonesia telah disinggung dalam berbagai pembicaraan yang berhubungan dengan ideologi Pancasila sejak 1957 dalam forum Konstituante di Bandung. Negara Indonesia adalah negara Pancasila dan bukan negara ataupun atheis. Hal ini dapat dilihat bahwa salah satu sila dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan dalam urutan pertama berfungsi sebagai sumber pembimbing moral bagi sila-sila lainnya dalam ikatan kesatuan yang tak terpisah-pisahkan.

Pembicaraan dalam sidang-sidang Konstituante yang terjadi pada tahun 1957 dimana fraksi Katolik maupun fraksi Kristen Protestan menentang sekularisme. Dalam sekularisme, negara tidak mengenal atau tidak mau mengenal agama, sehingga hal ini akan menjurus ke pandangan hidup materialistis atheis. Para pendiri negara mengakui bahwa mereka sepenuhnya berkeyakinan bahwa ideologi Pancasila bukan bersumber kepada filsafat materialistis atheis, dan juga tidak menjurus ke arah itu. Ideologi Pancasila melahirkan negara nasional bagi seluruh bangsa Indonesia. Negara Pancasila bukan negara theokratis dan bukan negara sekular.

Bila kita melihat kembali Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya tidak ada hal-hal yang memisahkan antara agama dan negara. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga disebutkan bahwa :

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Hal ini menegaskan apa yang menjadi motivasi riil dan materiil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan/kepercayaannya, menjadi motivasi spiritualnya, bahwa maksud dan tindakannya menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Dengan demikian digambarkan, bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan; keseimbangan kehidupan materiil dan spiritual, keseimbangan di dunia dan akhirat.¹¹⁾

Selanjutnya dalam batang tubuh UUD 1945 terutama pasal 29 dinyatakan bahwa :

ayat 1 : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kebebasan memeluk agama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara dan juga bukan pemberian golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, sehingga tidak

 11). Bahan Penataran P4, UUD 1945, GBHN; BP-7 Pusat; Jakarta; 1993; hal. 94.

dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.

Sedangkan dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, keberadaan Departemen Agama selalu ada. Hal ini membuktikan bahwa agama tidak dipisahkan dari kehidupan negara. Misalnya : pemerintah dalam hal ini Departemen Agama juga mengurus perjalanan jemaah haji dari Indonesia.

Dalam bidang hukum, ada Undang-Undang Perkawinan bagi umat Islam. Sedangkan di bidang pendidikan, mata pelajaran agama merupakan mata pelajaran wajib dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Demikian halnya dalam GBHN yang ditetapkan oleh MPR setiap lima tahun sekali, tidak menyebutkan pemisahan antara agama dan negara.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III KESIMPULAN

1. Untuk mengejar ketinggalannya dari negara maju, umumnya negara berkembang melakukan pembangunan yang lebih menekankan pada aspek pembaharuan di bidang teknologi dan ekonomi dengan melepaskan sistem religio politik tradisional.
2. Kebanyakan negara-negara berkembang lebih tertarik untuk mengkombinasikan sistem liberal dan komunisme (sinkrasi) sebagai sandaran berpijak dalam melakukan pembangunan di negaranya masing-masing.
3. Proses sekularisme di setiap negara berkembang tidak selalu sama. Hal ini terjadi karena ikatan-ikatan tradisi agama, artinya makin kuat sistem nilai keagamaan tradisional yang mengikat masyarakat, sekularisasi akan berjalan lambat; tetapi makin lemah tradisi keagamaan, sekularisasi akan berjalan cepat.
4. Negara Indonesia tidak melakukan praktek sekularisme. Hal ini dapat dilihat dalam praktek penyelenggaraan kehidupan kenegaraannya, misalnya :
 - a. Dasar Negara kita Pancasila, yang salah satu silanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan dalam urutan pertama dan berfungsi sebagai sumber pembimbing moral bagi sila-sila lainnya dalam ikatan kesatuan yang tak terpisahkan.
 - b. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga dan pasal 29 UUD 1945 menjelaskan bahwa agama mendapat tempat yang kokoh.

- c. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang ini selalu ada Departemen Agama.
- d. Dalam bidang hukum ada Undang-Undang Perkawinan bagi umat Islam.
- e. Dalam bidang pendidikan, mata pelajaran agama merupakan mata pelajaran wajib dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

1. Budiardjo, Miriam; Dasar-dasar Ilmu Politik; Gramedia; Jakarta; 1986.
2. Donald E, Smith; Religion and Political Development, an Analytic Study; Little Brown; Boston; 1985.
3. Gaffar, Afan; Beberapa Aspek Pembangunan Politik; Rajawali; Jakarta; 1983.
4. Bellah, Robert N.; Religion and Progress in Modern Asia; Free Press; New York; 1965.
5. Bahan Penataran P4, UUD 1945, GBHN; BE-7 Pusat; Jakarta; 1993.

UNIVERSITAS TERBUKA